

Analisis Yuridis Implementasi Pengaturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Berdasarkan Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat jo. Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Beserta Perubahan =
Yuridical Analysis of Implementation of Government Procurement Arrangement Based on Competition Law jo. President Regulation Of Government Procurement

Yohanes Ramot Gemilang, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20422366&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

Skripsi ini membahas implementasi/pelaksanaan pengaturan pengadaan barang/jasa pemerintah dengan menggunakan sistem e-procurement. Pengadaan barang/jasa pemerintah tidak terlepas dari ketentuan yang ada dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010. Pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah saat ini masih banyak ditemui persekongkolan tender. Perpres saat ini belum mampu mengurangi terjadinya persekongkolan tender pada pengadaan barang/jasa di instansi pemerintah sehingga sulit untuk menciptakan persaingan yang sehat. Hasil penelitian ini menemukan bahwa peraturan yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa pemerintah saat ini belum mampu memberikan sanksi yang cukup tegas sehingga masih terjadi pelanggaran. Dengan membentuk kembali sistem e-procurement melalui kerjasama dengan Negara Korea Selatan, serta pembuatan undang-undang untuk e-procurement sendiri diharapkan menjadi solusi dalam mengurangi tindak persaingan usaha tidak sehat.

ABSTRACT

The purpose of this thesis is to describe the implementation of Government Procurement Arrangement with the e-procurement system. Government procurement is based on President Regulation Number 54/2010 with their changes. In the other way, implementation of government procurement now a days still having a lot of problems in bid rigging. Today, President Regulations about government procurement cannot reduce bid rigging on government procurement, so that does not effective to be applicable. The result of this thesis is to find out those regulations cannot give clear sanction. To rebuild the e-procurement system, government can takes a cooperation with the Procurement System in South Korea.